

**EVALUASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 24  
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN  
BANGUNAN GEDUNG DI RUSUNAWA BEKASI JAYA KOTA BEKASI  
TAHUN 2021**

Andri Setiawan

Universitas Krisnadwipayana

[andri.setiawan.lk@gmail.com](mailto:andri.setiawan.lk@gmail.com)

*Submitted: 25/12/2021; Revised: 28/12/2021; Published: 31/12/2021*

---

**Abstract**

*The background of this research is the damage to the parts and components of the Bekasi Jaya flat houses. The purpose of this study was to determine the maintenance and care activities of the Bekasi Jaya flat houses carried out by the manager in implementing Permenpu Number 24 of 2008. Based on the results of the study, it is known that the maintenance activities carried out are routine activities such as cleaning the inside and outside of the building. Rusunawa maintenance activities carried out are repairing damaged parts and components of buildings. The architectural and structural parts of the two buildings experienced almost the same damage pattern, namely cracks in the walls and floors of the building as well as leakage of sewer pipes or clean water lines. Overall, the building maintenance activities carried out by the manager are good, but not fully in accordance with Permenpu Number 24 of 2008. Good maintenance activities have been carried out such as maintaining the cleanliness of the Rusunawa environment, repairing damaged parts and components, and planting beautifying plants. deer environment. Things that have not been done such as the absence of identity in some parts and components of the building and maintenance of emergency stairs that have not been carried out optimally.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Simple Rental Flat Houses*

**Pendahuluan.**

Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan ini dengan layak. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, terbatasnya lahan yang tersedia, biaya pembangunan yang tidak murah merupakan beberapa faktor yang menyebabkan rumah layak huni sulit dimiliki oleh sebagian masyarakat.

Pemerintah sebagai pemimpin memiliki kewajiban untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh dan menyejahterakan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh dan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah dengan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pembangunan rusunawa merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia rusunawa meliputi perencanaan, pembangunan, penguasaan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pembinaan dan pengendalian. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kondisi bangunan rusunawa adalah membuat regulasi atau peraturan tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Jumlah kepadatan penduduk pada suatu wilayah berpengaruh terhadap jumlah luas permukiman kumuh di wilayah tersebut. Semakin tinggi angka kepadatan penduduk suatu wilayah, maka kemungkinan besar semakin tinggi juga jumlah luas permukiman kumuh di wilayah tersebut. Bekasi Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk ini disebabkan oleh tetap atau berkurangnya luas wilayah dan semakin bertambahnya jumlah pendatang yang berasal dari kota-kota lain dan bertambahnya angka kelahiran di Kota Bekasi. Jumlah kepadatan penduduk di Kota Bekasi terutama kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bekasi Timur menjadi salah satu wilayah yang menjadi prioritas pembangunan rumah susun sederhana sewa oleh pemerintah melalui

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena sepanjang kali Baru terdapat permukiman kumuh dan revitalisasi fungsi kali Baru untuk mengatasi banjir dengan pelebaran dan pembuatan tanggul beton di sepanjang kali Baru. Kementerian Pekerjaan Umum mendirikan bangunan rusunawa yang terletak di kelurahan Bekasi Jaya kecamatan Bekasi Timur, kemudian diserahkan tanggung jawab pengelolaan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai pengawas dan UPTD Rusunawa Kota Bekasi sebagai pengelola.

Kementerian Pekerjaan Umum membuat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung yang mencakup seluruh gedung tidak bertingkat maupun gedung bertingkat termasuk rusunawa Bekasi Jaya. Walaupun demikian, pemeliharaan dan perawatan rusunawa Bekasi Jaya belum dapat dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Kota Bekasi yang ditunjukkan dengan adanya beberapa kerusakan bagian dan komponen bangunan rusunawa yang belum dapat diselesaikan.

Beberapa kerusakan bagian dan komponen rusunawa Bekasi Jaya yang menjadi pokok permasalahan adalah kebocoran pipa air yang terpasang di dalam tembok serta hilang dan rusaknya beberapa sarana dan utilitas lainnya. Beberapa titik kebocoran pipa air terjadi di dalam hunian dan sebagian besar titik kebocoran berada di luar hunian. Permasalahan ini mengganggu aktivitas dan kenyamanan penghuni rusunawa karena penghuni harus mengantisipasi kebocoran agar air tidak membasahi stop kontak, tidak membasahi barang-barang milik mereka, dan tidak membahayakan orang yang melintasi area yang mengalami kebocoran. Permasalahan ini juga mengakibatkan dinding dan plafon bangunan rusunawa berlumut dan lembab.

### **Kajian Pustaka**

Chandler dan Plano (Keban, 2014:60) public policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano (Keban, 2014:60) juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Shafritz dan Russell (Keban, 2014:60) memberikan definisi kebijakan publik yang paling mudah diingat dan mungkin paling praktis yaitu *whatever a government decides to do or not to do*. Kedua pengarang tersebut menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan respon terhadap suatu isu politik.

Proses kebijakan publik merupakan segala hal yang berhubungan dengan proses pembuatan alternatif atau pilihan yang dibuat berdasarkan pertimbangan teoritis dan praktis dan ditampilkan dalam model-model kebijakan publik (Keban, 2014:60). Menurut Dunn (Keban, 2014:61) tahapan kebijakan antara lain penetapan kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*),

implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*).

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang atau sudah berjalan yang meliputi fungsi dan tujuan kebijakan serta pengaruh kebijakan terhadap objek pelaksanaan dan lingkungannya. Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar lingkungan politik (Keban, 2014:79). Menurut Rossi & Freeman (Keban, 2014:79), evaluasi selain berguna untuk menilai program yang sedang berjalan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efisiensi dan efektivitas program, dan wujud tanggung jawab kepada pihak yang mendanai atau mensponsori program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah penilaian terhadap suatu kebijakan publik yang memerlukan persiapan berupa kelengkapan data dan analisa antara masukan dan keluaran hasil kebijakan yang muncul untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan program atau kebijakan yang telah ditetapkan agar diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan serta agar diketahuinya keberhasilan kebijakan tersebut dalam mencapai target atau tujuan. Masalah yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan adalah kelemahan dalam penyusunan indikator keberhasilan, merumuskan masalah, mengidentifikasi tujuan, perbedaan persepsi tujuan antara penilai dan yang dinilai, perbedaan waktu, penilaian bersifat subjektif, dsb (Keban, 2014:79).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Peneliti mendapatkan data primer melalui proses wawancara dengan UPTD Rusunawa Kota Bekasi, penghuni rusunawa, dan dokumentasi hasil pengamatan secara langsung di rusunawa Bekasi Jaya. Data sekunder diperoleh melalui internet yaitu mencari informasi yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perawatan bangunan rusunawa Bekasi Jaya.

## **Pembahasan**

### **Gedung Lama (Tower A)**

Pembangunan gedung lama rusunawa Bekasi Jaya dimulai pada tahun 2004 dan terhenti pada tahun 2006 yang terdiri atas tiga lantai yaitu satu lantai dasar dan dua lantai sarusun. Gedung lama memiliki 96 sarusunawa dengan ukuran 3m×7m/unit. Gedung lama tidak terpelihara dan tidak terawat karena saat itu belum dilakukan serah terima kepengurusan rusunawa antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Bekasi.

Pembangunan gedung lama dilanjutkan kembali pada tahun 2009 dan ditambah dua lantai hunian. Pemerintah pusat menyerahkan kepengurusan rusunawa (gedung lama) kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai penanggung jawab dan UPTD Rusunawa Kota Bekasi sebagai pengelola.

Gedung lama terdiri dari lima lantai yaitu satu lantai dasar dan empat lantai hunian. Lantai dasar gedung lama terdapat tempat parkir, kantin atau toko kelontong, aula atau tempat pertemuan, pintu keluar jalur evakuasi, ruang panel listrik, penampungan air bawah, selokan atau saluran pembuangan air, TPS (tempat pembuangan sementara), dan lampu jalan. Lantai satu sampai lantai empat berisi unit hunian yang berjumlah 96 unit tipe 21 ukuran 3m×7m. Setiap unit dilengkapi dengan kamar mandi, pintu, wastafel cuci piring, ventilasi udara, dan jendela. Pada plafon yang berada di lantai empat terdapat dua penampung air bersih ukuran masing-masing 4100 liter yang mengalirkan air bersih langsung menuju masing-masing unit hunian.

### **Gedung Baru (Tower B)**

Gedung baru (tower B) mulai dibangun pada tahun 2012 yaitu dua tahun setelah penyerahan dan peresmian gedung lama. Pembangunan gedung baru berlangsung selama dua tahun dan diresmikan pada tahun 2014. Gedung baru memiliki lima lantai yang terdiri atas satu lantai dasar dan empat lantai sarusun atau hunian.

Gedung baru memiliki 96 hunian tipe 24 dengan ukuran 4m×6m. Walaupun gedung ini merupakan bangunan baru, tetapi sudah terlihat banyak titik kebocoran di beberapa bagian gedung. Kebocoran tersebut menyebabkan dinding dan plafon menjadi lembab sehingga dinding dan plafon ditumbuhi oleh lumut. Lantai dasar bangunan gedung baru terdapat tempat parkir, toilet, tangki septik, hidran, kantor UPTD Rusunawa, ruang istirahat pegawai UPTD, ruang dan tempat kosong, papan informasi, ruang panel

listrik, pintu keluar jalur evakuasi, tempat sampah sementara (TPS), dan ruang mesin pompa. Lantai hunian gedung baru terdiri atas 4 lantai. Masing-masing lantai terdapat 24 unit hunian tipe 24 ukuran 4m×6m, sehingga secara keseluruhan gedung baru memiliki total 96 unit hunian. Setiap unit hunian terdapat kamar tidur, kamar mandi, pintu masuk, pintu belakang, balkon hunian, jendela, ventilasi, dan wastafel cuci piring.

### **Pemeliharaan Rusunawa Bekasi Jaya**

Pemeliharaan rusunawa Bekasi Jaya adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan rusunawa Bekasi Jaya serta prasarana, sarana dan utilitas dari hal-hal yang dapat merubah tampilan bangunan, membuat lingkungan kumuh, dan merusak bagian bangunan rusunawa Bekasi Jaya agar selalu layak dan baik fungsi. Pemeliharaan bangunan rusunawa harus dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). Pembuatan SOP diperlukan agar kegiatan pemeliharaan rusunawa berjalan secara sistematis dan teratur. Kegiatan pemeliharaan rusunawa merupakan kegiatan yang berorientasi kepada bentuk fisik dan lingkungan rusunawa. Ruang lingkup pemeliharaan rusunawa Bekasi Jaya berdasarkan bentuk fisik dan lingkungan adalah: Pemeliharaan Arsitektur Bangunan, Pemeliharaan Struktur Bangunan, Pemeliharaan Mekanikal, Pemeliharaan Elektrikal, dan Pemeliharaan Tata Ruang Luar.

### **Perawatan Rusunawa Bekasi Jaya**

Perawatan rusunawa Bekasi Jaya merupakan kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan dan/atau komponen rusunawa, bahan bangunan, dan/atau prasarana, sarana dan utilitas rusunawa Bekasi Jaya yang rusak atau sudah mencapai masa pakai agar tetap layak dan baik fungsi. Perawatan rusunawa Bekasi Jaya terbagi menjadi perawatan berdasarkan jenis dan perawatan berdasarkan bentuk bangunan. Perawatan berdasarkan jenis yaitu perawatan rutin, perawatan berkala, perawatan mendesak, dan perawatan darurat. Perawatan berdasarkan bentuk bangunan yaitu rehabilitasi, renovasi, dan restorasi.

#### **a. Perawatan Berdasarkan Jenis:**

##### **1) Perawatan Rutin**

Perawatan rutin rusunawa Bekasi Jaya merupakan kegiatan operasional harian dan perbaikan dan/atau penggantian bagian dan/atau komponen bangunan disebabkan rusak atau tercapainya masa pakai. Perawatan rutin ditujukan untuk perbaikan

bagian dan/atau komponen bangunan yang sering mengalami kerusakan dan bagian dan/atau komponen tersebut telah dipersiapkan persediaannya.

#### 2) Perawatan Berkala

Perawatan berkala rusunawa Bekasi Jaya merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai jadwal dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan sebagian atau kerusakan total pada bagian dan/atau komponen bangunan rusunawa Bekasi Jaya.

#### 3) Perawatan Mendesak

Perawatan mendesak rusunawa Bekasi Jaya merupakan kegiatan atau pekerjaan tidak terencana dalam anggaran rusunawa yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan mendesak yang diketahui berdasarkan hasil inspeksi atau laporan. Bagian dan/atau komponen yang membutuhkan perbaikan mendesak saat mengalami kerusakan adalah bagian dan/atau komponen fasilitas umum yang jika tidak segera diperbaiki, maka akan mengganggu aktivitas kehidupan rusunawa dan/atau menjadi objek pemandangan yang tidak nyaman ketika kerusakan dibiarkan begitu saja. Permasalahan yang sering membutuhkan perbaikan mendesak adalah kerusakan yang terjadi pada mesin pompa dan kerusakan yang berhubungan dengan listrik.

#### 4) Perawatan Darurat

Perawatan darurat rusunawa Bekasi Jaya merupakan kegiatan atau pekerjaan yang bersifat segera terhadap bagian dan/atau komponen bangunan yang memerlukan penanganan atau perbaikan segera agar tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Beberapa kerusakan yang terjadi di lingkungan rusunawa dan memerlukan perbaikan darurat seperti korsleting (arus pendek) dan kaca panel daya (meteran) pecah.

### b. Perawatan Berdasarkan Bentuk Bangunan

#### 1) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan bangunan yang telah rusak sebagian disebabkan pemakaian bangunan dan/atau bencana alam dengan maksud menggunakan bangunan sesuai fungsi tertentu yang tetap, arsitektur maupun struktur yang tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah. Rusunawa Bekasi Jaya mengalami satu kali rehabilitasi pada bulan juni tahun 2020.

Rehabilitasi dilakukan terhadap bangunan gedung lama meliputi perbaikan sarusunawa (satuan unit rusunawa) yang mengalami kerusakan pada dinding, lantai dan plafon, serta saluran pembuangan air dan atap bangunan.

## 2) Renovasi

Renovasi adalah kegiatan memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian atau kegiatan menyempurnakan bentuk bangunan dengan maksud menggunakannya sesuai fungsi tertentu yang tetap atau berubah dengan arsitektur, struktur, dan utilitas yang dapat berubah atau tetap. Bangunan gedung lama didirikan pada tahun 2004 dan pembangunan diselesaikan pada tahun 2006. Selama tiga tahun bangunan tidak terpelihara dan terawat dengan baik. Sebagian besar bagian dan komponen bangunan hilang dan rusak, sehingga pemerintah melakukan renovasi sebagian terhadap bentuk bangunan pada tahun 2009. Bangunan gedung lama rusunawa Bekasi Jaya saat ini adalah hasil renovasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2009.

## 3) Restorasi

Restorasi adalah perbaikan bangunan yang telah rusak berat sebagian atau kegiatan pemugaran bangunan yang tidak berfungsi dengan maksud menggunakan kembali untuk fungsi tertentu yang tetap atau berubah dengan arsitektur yang tetap, tetapi struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah. Rusunawa Bekasi Jaya belum pernah mengalami restorasi karena sejak didirikan sampai saat ini, bangunan gedung lama dan gedung baru masih berfungsi sebagai hunian.

## Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh UPTD Rusunawa Kota Bekasi dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan rusunawa Bekasi Jaya dengan beberapa bagian kebijakan yang belum dilaksanakan.
2. Beberapa bagian yang belum dilaksanakan yaitu tidak adanya identitas atau nama dan cara penggunaan barang dan komponen bangunan seperti tidak adanya tanda keluar jalur evakuasi tangga darurat, tidak ada keterangan cara menggunakan APAR, tidak ada keterangan mana toilet pria dan wanita pada toilet lantai dasar bangunan,

kondisi tangga darurat gedung lama yang berkarat dan mengalami korosi menunjukkan pemeliharaan dan perawatan bagian ini belum optimal. Penggunaan gembok pada pintu jalur evakuasi gedung lama merupakan hal yang tidak menjadi bagian dalam kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008

3. Tidak terselesaikannya masalah saluran pipa air yang bocor disebabkan belum diketahuinya sumber kerusakan dan prosedur perbaikan yang membutuhkan biaya besar dan pelaksanaan yang terorganisir terutama perhatian terhadap aktivitas penghuni karena beberapa kamar harus dikosongkan selama perbaikan.
4. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 dinilai efektif dalam mempertahankan nilai daya dan guna bagian dan komponen bangunan rusunawa Bekasi Jaya karena mengatur secara khusus dan terperinci yaitu pengaturan tentang penggunaan alat pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan jumlah pelaksana yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 dinilai oleh pengelola kurang efisien dalam hal biaya karena anggaran pemeliharaan dan perawatan yang diberikan Pemkot Bekasi belum mencukupi untuk pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 secara optimal.

### **Saran**

1. Hubungan interaksi antara pengelola dan penghuni harus dijalin dengan baik, membangun komunikasi searah yang aktif antara pengelola dan penghuni dengan mengadakan pertemuan rutin yang membicarakan terkait program dan kegiatan rusunawa terutama masalah pemeliharaan dan perawatan bangunan.
2. Penghuni diberikan pengertian dan pemahaman secara berkelanjutan dan bertahap bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan rusunawa adalah tanggung jawab bersama. Penghuni diajak berperan aktif dalam memelihara dan merawat lingkungan rusunawa agar menjadi lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.
3. Pengelola berusaha untuk mengikuti pedoman terkait tata cara pemeliharaan dan perawatan rusunawa yang berlaku, sehingga kegiatan pemeliharaan dan perawatan rusunawa berjalan secara sistematis dengan kontrol dan evaluasi yang benar serta secara bertahap mengajak dan menghimbau penghuni untuk menaati aturan yang

berlaku dan penerapan sanksi yang tegas ditambah tindakan represif sesuai situasi dan kondisi.

4. Pengelola membuat dan menyimpan arsip tentang tata cara penggunaan atau SOP (Standart Operasional Prosedur) bagian dan/atau komponen bangunan, membuat salinan tertulis SOP yang dilapisi menggunakan lapisan transparan yang tebal dan keras agar tulisan tidak pudar, kemudian ditempel pada atau dekat bagian dan/atau komponen bangunan agar penghuni juga mengerti tata cara penggunaannya.
5. Disediaknya prasarana dan sarana bermain anak dan pengarahannya agar anak-anak tidak bermain di teras lantai hunian yang dapat membahayakan diri mereka dan berpotensi merusak fasilitas umum rusunawa.
6. Apabila pintu keluar jalur evakuasi harus dikunci, maka penggunaan tali tisu atau alat pengunci lain yang tidak membutuhkan anak kunci sangat disarankan agar pintu keluar jalur evakuasi dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat.
7. Pemberian dan penempelan nama pada ruang dan tempat fasilitas umum agar tamu dan penghuni mengerti nama dan fungsi tempat tersebut.
8. Menerapkan sistem instalasi terbuka pada pipa saluran pembuangan air gedung baru agar apabila terjadi kebocoran pada pipa saluran pembuangan air, kebocoran dapat dideteksi lebih mudah dan penanganan masalah yang lebih cepat.
9. Mengganti tangga darurat gedung lama yang terbuat dari besi dengan tangga beton yang pemeliharaannya dan perawatannya tidak sulit dan waktu penggunaan tangga beton dinilai lebih lama (awet) daripada tangga besi yang mudah korosi.

### Daftar Pustaka

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

BPS Kota Bekasi. Dikutip 01 Maret 2020. <https://bekasikota.bps.go.id/publication/2020/04/28/b3c9a8f66a47b925b30b81c8/kota-bekasi-dalam-angka-2020.html> BPS Pusat. Dikutip 01 Maret 2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1558/jumlah-rusunawa-dan-perumnas-yang-dibangun-unit-.htm>

Handoko, T Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keempat Belas. Jakarta: BPFE.

\_\_\_\_\_. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan Belas. Jakarta: BPFE.

- Hasibuan, H Malayu S P. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Kemenpera, Pusdiklat. 2016. Pengelolaan Rusunawa. Bandung. Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mokh Subhan. 2008. Tesis. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Cengkareng Jakarta Barat. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siswanto, H B. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan Kedelapan. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Bandar Maju.